

**PERSEPSI MASYARAKAT DAYAK MERAP DAN PUNAN
TENTANG PENTINGNYA HUTAN DI LANSEKAP HUTAN
TROPIS, KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN TIMUR**
*(Dayak Merap and Punan People's Perception of the Importance of
Forest in a Tropical Landscape, Malinau, East Kalimantan)*

NINING LISWANTI¹, ANDRY INDAWAN², SUMARDJO³ dan DOUGLAS SHEIL⁴

ABSTRACT

This study's emphasis was on Dayak Merap and Punan people's perception of the importance of forest. A participatory approach using scoring exercises was completed with seven forest dwelling communities in the tropical landscape of Malinau, East Kalimantan. The findings suggest that un-logged forest was the most important land category for Dayak people. It provides for their livelihoods and well-being both directly and indirectly. 'Forest' has the heritage values and contains an abundance of valued and significant plants and animal. For the future, 'forest' is predicted to remain important for local people mainly for timber. Forests are exceptional in comparison with other land types in providing a wide range of highly valued goods and services, in most cases to a greater degree than other land types. In addition, the value of forest decreases less with apparent distances. However, logged forest is related as much less important, allowing us to consider improvements in forest management that might better protect local values.

Key words: Local people's perception, participation, rapid appraisal, scoring exercises, landscape, tropical rain forest, Malinau district.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati (*KEHATI*) yang amat kaya dan khas, dan telah menjadi andalan bagi sebagian besar pembangunan di Indonesia, contohnya di Kalimantan Timur. Pada tahun 1987, wilayah ini telah menghasilkan 21% pendapatan ekspor Indonesia, yang berasal dari cadangan sumberdaya alam seperti hutan, minyak gas, batu bara, dan mineral-mineral yang lain (MacKinnon *et al.*, 1996). Eksploitasi kekayaan alam pada saat itu, nampak masih belum memperhitungkan aspek

¹ Staf Peneliti Program Biodiversity, CIFOR, Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680.

² Dosen Senior dan Peneliti pada Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus Darmaga P.O. Box 168 Bogor.

³ Staf Pengajar, Fakultas Pertanian IPB, Kampus Darmaga, Bogor

⁴ Kepala Program Biodiversity, CIFOR, Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680.

kelestarian. Di sisi lain, potensi *KEHATI* yang tinggi di wilayah ini masih banyak yang belum terungkap, salah satunya adalah daerah Malinau di Kalimantan Timur. Diduga wilayah ini mengandung kekayaan jenis hewan dan tumbuhan yang berguna (MacKinnon *et al.*, 1996; Wulffraat dan Samsu, 2000), namun hingga saat ini masih sedikit diketahui keadaan biologinya.

Masyarakat dayak Kenyah, Merap dan Punan, dan beberapa kelompok minoritas masyarakat dayak pendatang, merupakan penghuni desa-desa di sepanjang sungai Malinau. Diantara suku-suku tersebut, dayak Merap dikenal merupakan suatu kelompok yang berpengaruh pada konteks lokal, sedangkan dayak Punan secara politik nampak kurang berpengaruh. Kedua suku tersebut hingga saat ini memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di lansekap mereka, seperti berburu, menangkap ikan, mengolah kebun dan ladang, dan memanfaatkan hutan untuk mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, bahan bangunan serta kerajinan tangan.

Aktivitas para *stakeholder* telah merubah kondisi hutan di wilayah Malinau. Pada masa pemerintahan orde baru, wilayah ini diperuntukkan sebagai hutan produksi dan telah dialokasikan pada perusahaan komersil. Namun sebagian dari wilayah tersebut diakui dan dibagi oleh masyarakat lokal menjadi hak tradisional mereka (Sheil *et al.*, 2002). Setiap *stakeholder* memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan terhadap *KEHATI*. Masyarakat lokal menggunakan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan perusahaan kayu dan batubara menggunakan hutan untuk mendapatkan keuntungan. Situasi ini memberikan tekanan pada hutan di wilayah Malinau, yang saat ini telah terkena dampak problema klasik 'pembangunan vs kelestarian'. Munculnya konflik, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan lahan antara perusahaan komersil, pemerintah dan masyarakat lokal, menjadi kendala utama pelaksanaan konservasi *KEHATI* di wilayah ini. Kurangnya keberhasilan upaya pelaksanaan konservasi yang bersifat *top-down* dan implementasi kebijakan dan peraturan perundangan tentang sumberdaya hutan yang sering mengabaikan masyarakat lokal, serta meningkatnya degradasi lahan dan hutan, semakin mempersulit pelaksanaan konservasi sumberdaya alam di lansekap Malinau.

Penelitian-penelitian mengenai keanekaragaman hayati sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini hasil-hasil penelitian tersebut sering tidak secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, tapi terlebih dahulu melalui para pembuat kebijakan, sehingga manfaat dari hasil penelitian keanekaragaman hayati tersebut masih kurang dirasakan oleh masyarakat lokal. Banyak orang luar belum memahami apa pentingnya hutan bagi masyarakat lokal. Para pembuat keputusanpun masih kesulitan menggunakan data jenis-jenis tanaman hasil penelitian *KEHATI* karena nampaknya masih dianggap kurang bermanfaat (Sheil, 2002).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat lokal khususnya Dayak Merap dan Punan mengenai kebutuhan dan kepentingan mereka pada hutan dengan menggunakan metode skoring. Kajian ini akan mengungkapkan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang belum diketahui oleh pihak luar dan diharapkan hasilnya dapat dipergunakan sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan konservasi *KEHATI* secara *bottom-up*, melalui partisipasi masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan konsep ‘nilai’ dan ‘kepentingan’ (Sheil *et al.*, 2002; 2004). ‘Nilai’ maksudnya adalah pandangan-pandangan masyarakat lokal bukan ‘nilai’ yang berkaitan dengan konteks ekonomi, sedangkan ‘kepentingan’ berhubungan dengan apa yang sedang di nilai dan lebih menekankan pada penilaian relatif dan bersifat subyektif, artinya tergantung pada pengetahuan dan pengalaman pribadi seseorang. Jadi dalam melakukan kegiatan skoring, kami menghindari penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan harga (harga, ongkos, uang, mahal, murah), namun lebih menekankan pada konsep ‘nilai umum’, ‘kegunaan’ (manfaat) dan ‘kepentingan’ (penting, sangat penting). Metode yang digunakan adalah metode pemberian skor atau distribusi kerikil (*Pebble Distribution Method /PDM*) (Sheil dalam CIFOR, 2002) melalui pendekatan partisipasi dengan tujuan agar obyek yang diteliti yaitu masyarakat lokal dapat berpartisipasi selama penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian terletak pada $2^{\circ}45' - 3^{\circ}21'$ LU dan $115^{\circ}48' - 116^{\circ}34'$ BT, dengan luas sekitar 2000 km². Tujuh desa dipilih sebagai lokasi penelitian dari 19 desa yang tersebar dari hilir hingga hulu di sepanjang sungai Malinau. Pemilihan desa dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* dengan strata utama yaitu suku Dayak Merap dan Punan. Kedua suku tersebut dipilih karena memiliki budaya yang berbeda dan menonjol di DAS Malinau, dengan perbedaan utama adalah bahwa Merap lebih menekankan pada pertanian padi/sawah sementara Punan lebih menekankan pada aktivitas berbasis hutan (Sheil *et al.*, 2002 dan 2004; dan Uluk *et al.*, 2001). Desa Merap diwakili oleh Gong Solok, Langap dan Paya Seturan, sedangkan desa Punan diwakili oleh Punan Rian, Liu Mutai, dan Long Jalan. Desa Laban Nyarit mewakili suku Punan dan Merap. Kegiatan penelitian dilakukan dari bulan Juni 2003 hingga Mei 2004.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan skoring dengan teknik diskusi kelompok terfokus (lihat Sheil *et al.*, 2002 dan 2004). Selanjutnya, data-data tersebut ditabulasi dan di analisis berdasarkan nilai ‘kepentingan’ yang diperoleh dari hasil setiap diskusi kelompok terfokus. Setiap kegiatan skoring selalu mengikuti prosedur yang pasti, maksudnya sebelum kegiatan dimulai, fasilitator memperkenalkan setiap kartu berlabel dan bergambar yang mewakili tipe-tipe lahan, dan di taruh di lantai sehingga dapat dilihat dan dijangkau oleh semua informan. Setelah diberikan penjelasan dan contoh, para informan kemudian di minta untuk menyebarkan seratus alat penghitung (dapat berupa biji/kancing/korek api) di atas kartu-kartu tersebut menurut ‘kepentingan’ masyarakat lokal. Sebagai ilustrasi, jika 10 biji diletakkan di kartu ‘hutan’ dan 5 biji di kartu ‘jekau muda’, ini artinya lahan hutan adalah dua kali lebih penting dibandingkan lahan jekau muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Hutan bagi Suku Merap dan Punan

'Hutan' merupakan tipe lahan terpenting bagi suku Merap dan Punan (Tabel 1), baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan bermanfaat secara langsung karena menyediakan hasil-hasil hutan yang dapat dikonsumsi, sedang manfaat hutan secara tidak langsung yaitu dengan menyediakan lahan-lahan untuk berladang dan berkebun sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pentingnya hutan bagi suku Merap terutama untuk kebutuhan bahan material bangunan, konstruksi perahu, dan bahan peralatan. Sementara bagi suku Punan, hutan sangat penting terutama untuk diambil rotannya sebagai bahan anyaman, atau sebagai bahan material bangunan rumah dan perahu. Untuk tipe lahan-lahan yang lain seperti bekas kampung, rawa, jekau muda (bekas kawasan budidaya yang telah diabaikan kurang dari 10 tahun) dan jekau tua (bekas kawasan budidaya yang telah diabaikan lebih dari 10 tahun), dinilai kurang penting bagi kedua suku tersebut karena umumnya hanya dikunjungi sekali-sekali saja.

Tabel 1. Nilai rata-rata skoring untuk tipe-tipe lahan pada suku Merap dan Punan

Suku	Tipe-tipe Lahan								Jumlah	
	Kampung	Bekas Kampung	Kebun	Sungai	Rawa	Ladang	Jekau Muda	Jekau Tua		
Punan	14.42	6.25	10.67	14.17	5.67	12.17	6.50	7.17	23.00	100
Merap	11.07	5.29	12.29	12.21	8.93	14.64	6.43	8.93	20.21	100

Masyarakat Merap di Langap menilai pentingnya daerah sarang burung di kawasan hutan sebagai suatu perdagangan yang menguntungkan, namun desa lain seperti Paya Seturan dan Gong Solok mempunyai alasan berbeda dalam menilai hutan. Mereka mengemukakan bahwa pembebasan lahan untuk ladang di daerah hutan membuat mereka mendapatkan pengakuan kepemilikan. Isu hak milik untuk mendapatkan teritorial desa yang lebih besar telah meningkat dengan pesat dan menjadi perdebatan bagi pemerintah lokal dan pusat. Saat ini, suku Merap merasa perlu melakukan perlindungan hutan dari kegiatan penebangan kayu maupun perladangan, mengingat pentingnya hutan bagi anak-anak mereka di masa depan. Hasil-hasil hutan yang umumnya berasal dari hutan primer, juga diupayakan hanya di ambil seperlunya saja, sehubungan dengan lokasinya yang jauh dari desa. Jadi untuk sumber pencaharian mereka sehari-hari, lebih menggantungkan pada kegiatan berladang dan berkebun. Peraturan adat telah membantu upaya-upaya pelaksanaan perlindungan hutan, seperti lokasi sarang burung walet di Langap yang dilindungi dan di larang oleh adat untuk dimanfaatkan. Bahkan di Laban Nyarit sengaja membuat hutan lindung untuk cadangan masa depan.

'Hutan' bagi masyarakat Punan di Liu Mutai dan Long Jalan lebih ditekankan untuk di konsumsi langsung dengan mengambil sumber makanan liar baik hewan maupun tumbuhan. Berdasarkan penjelasan para informan, dapat dilihat bahwa status hutan sedang berubah. Banyak informan menjelaskan bahwa kegiatan penebangan kayu dan tambang

batubara telah menurunkan sumberdaya hutan dan mengurangi akses mereka ke hutan. Suku Punan memandang hutan merupakan bagian dari mereka dan memiliki arti penting sehubungan dengan nilai-nilai sejarah yang tersembunyi dan selalu dijaga agar tidak dirusak oleh pihak luar. Misalnya pada tradisi menyimpan mayat dalam guci (tempayan besar) dan menguburnya di hutan. Guci yang sangat bernilai itu sering hilang dicuri sehingga tabu bagi mereka membicarakan hal ini dan tetap dirahasiakan untuk melindungi lokasi kuburan di hutan. Hutan juga menjadi tempat persembunyian orang Punan (di bawah batu, di gua, atau di atas pohon). Jasad orang-orang Punan jaman dulu tersimpan rapi di dalam hutan. Aturan adat melarang pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan pertanian disekitar lokasi kuburan dengan radius ≥ 1 hektar.

Untuk tipe-tipe hutan, baik suku Merap maupun Punan sangat mengutamakan 'hutan belum ditebang'. Hutan yang belum ditebang merupakan penutupan lahan terpenting (Tabel 2), karena menyediakan banyak tumbuhan dan hewan yang bermanfaat. Peraturan adat dalam memanfaatkan hutan diberlakukan di sini, terutama pengambilan kayu yang dibatasi hanya untuk membuat rumah, bangunan serta peralatan. Menurut persepsi lokal umumnya sumberdaya hewan dan tumbuhan masih berlebihan di hutan yang belum ditebang. Pengambilan hasil hutan di hutan primer ini diatur lembaga adat, yaitu diambil seperlunya. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, peralatan, bahan bangunan rumah atau kegunaan lainnya menurut kebutuhan masing-masing. Hutan ini juga menjadi pilihan utama pada saat masyarakat berencana membuat ladang. Alasan utama selain memiliki tanah yang subur, lokasinya lebih dekat dengan desa.

Tabel 2. Nilai rata-rata skoring untuk tipe-tipe hutan pada suku Merap dan Punan.

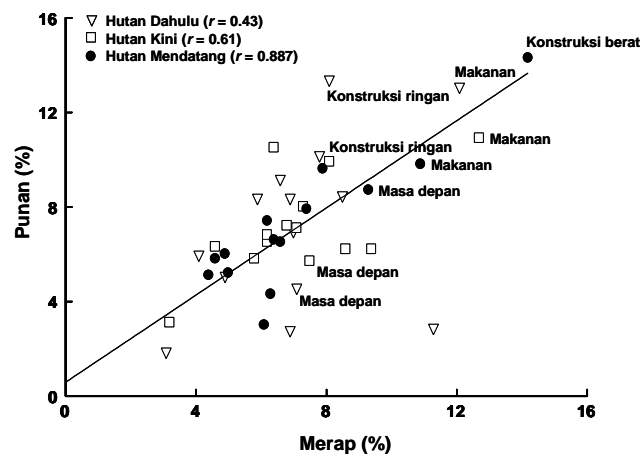
Suku	Tipe-tipe Hutan					Jumlah
	Hutan belum ditebang	Hutan gunung	Hutan rawa	Hutan sekunder	Hutan bekas tebangan	
Merap (m)	27.93	18.70	23.50	17.71	12.07	100
Punan (p)	35.08	29.75	14.17	13.67	7.33	100

Hal yang cukup mencolok disini adalah pada 'hutan bekas tebangan' hampir seluruh responden memberikan skor yang rendah (Tabel 2). Tipe hutan ini sangat tidak diminati oleh masyarakat lokal dan secara keseluruhan mendapat skor paling kecil (m=12.07 dan p=7.33). Akibat ditebangnya pohon-pohon yang bernilai ekonomis, masyarakat kehilangan nilai-nilai penting yang ada di hutan ini. Sistem silvikultur yang diterapkan dalam kegiatan penebangan hutan telah menyebabkan banyak spesies-spesies berguna dan memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi hilang. Terutama dengan adanya peraturan pada sistem tebangan tersebut, yang mengharuskan untuk melakukan pembersihan pada tumbuhan bawah. Jenis-jenis tumbuhan bernilai seperti *gaharu*, rotan, tanaman obat, sumber makanan hewan liar, sudah tidak mungkin didapatkan lagi pada hutan-hutan bekas tebangan. Kegiatan penebangan hutan tersebut, menurut suku Punan dan Merap, telah menurunkan jumlah spesies kayu bernilai dan sumber makanan yang penting bagi mereka seperti sagu hutan, serta mengurangi akses masyarakat untuk berburu

yang merupakan salah satu mata pencaharian dan juga tradisi bagi kedua suku tersebut. Menurut Sheil *et al.* (2003) Dampak dari kegiatan pembalakan tersebut terkait erat dengan berkurangnya sumberdaya pokok, aksesibilitas, dan hak mengelola oleh masyarakat lokal.

Pentingnya Hutan Dahulu, Kini, dan Mendatang bagi Suku Merap dan Punan

Masyarakat Merap dan Punan memiliki persepsi yang berbeda saat membicarakan penggunaan hutan pada kurun waktu yang berbeda, umumnya berdasarkan pada prioritas dan pilihan masing-masing (Gambar 1). Perbedaan pilihan tersebut ditunjukkan oleh korelasi yang rendah untuk hutan ‘dulu’ (0.433) dan ‘kini’ (0.613). Namun kedua suku menunjukkan korelasi yang kuat pada hutan ‘mendatang/masa depan’ yang berarti bahwa mereka memiliki kesamaan pilihan (0.887). Artinya baik suku Punan maupun Merap memiliki prioritas yang sama dalam memanfaatkan hutan dimasa depan. Semakin rendah nilai korelasi seperti pada hutan pada waktu ‘dulu’, hal tersebut menandakan bahwa kedua suku memiliki perbedaan prioritas dalam memanfaatkan hutan. Pada Gambar 1, ditunjukkan bahwa kategori ‘makanan’ adalah salah satu kategori terpenting bagi Suku Punan and Merap dari hutan diwaktu ‘dulu’, ‘kini’, dan ‘mendatang/masa depan’. Ditegaskan oleh responden bahwa pada hutan waktu ‘dulu’, aktivitas perusahaan masih sedikit, sehingga sumber makanan berlimpah. Prioritas selanjutnya bagi Merap adalah pada bahan konstruksi berat (bangunan rumah), sedang Punan lebih mengutamakan bahan konstruksi ringan untuk membuat pondok di ladang. Hasil yang menarik juga diperoleh dari analisis dimana Punan dan Merap memiliki korelasi yang tinggi sehubungan dengan kepentingan mereka dimasa mendatang/masa depan (Gambar 1).



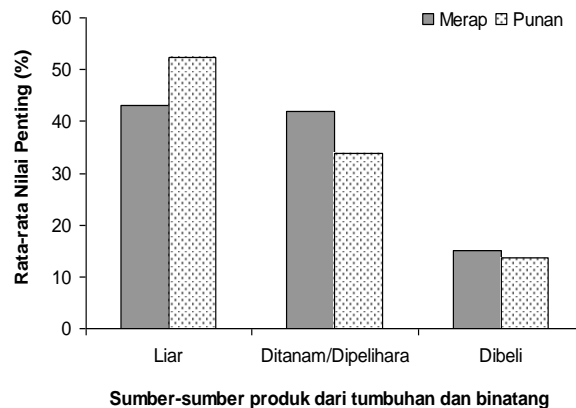
Gambar 1. Korelasi antara suku Merap dan Punan untuk nilai penting hutan pada kurun waktu yang berbeda (hutan ‘dulu’, ‘kini’, dan ‘mendatang/masa depan’).

Korelasi yang tinggi dapat dilihat dari pola yang sama pada kepentingan hasil hutan, terutama pada kategori ‘makanan’, ‘bahan konstruksi berat’, dan ‘masa depan’. Sagu liar atau *palm starch* adalah makanan yang paling disukai, dan kayu ‘ulin’ atau

Eusideroxylon zwagerii adalah species yang paling disukai untuk bahan bangunan. Memahami suku Punan yang telah mengurangi pola hidup nomadik, maka mengetahui kepentingan mereka pada kategori bahan bangunan adalah hal yang logis. Beberapa grup Punan menjelaskan bahwa alasan mereka untuk pola hidup yang lebih menetap adalah berkaitan dengan keterbatasan lahan dan untuk memberikan rasa aman bagi keluarga mereka. Kategori 'dapat dijual' juga menjadi prioritas, berkaitan mata pencaharian mereka sebagai pemburu gaharu yang memberikan pendapatan signifikan. Di Long Jalan, harga gaharu dengan kualitas terbaik tahun 2002 mencapai Rp5-6 juta per kg (USD \$455-545) (juga di catat dalam Wollenberg, 2001).

Pentingnya Sumber-sumber Produk Hutan bagi Suku Merap dan Punan

Sumber-sumber produk (tumbuhan maupun binatang) dari hidupan liar masih menjadi pilihan utama bagi suku Punan, sedangkan suku Merap memberikan pilihan yang seimbang antara sumber produk yang berasal dari hidupan liar dan sumber produk yang sengaja mereka tanam atau dipelihara (Gambar 2). Sumber-sumber produk dibeli kurang diminati oleh kedua suku. Pada saat ini suku Merap yang ada di hilir telah merasakan bahwa lokasi hutan sudah semakin jauh seiring dengan meningkatnya kegiatan HPH dan pertambangan, serta aktivitas perladangan oleh masyarakat lokal di kawasan hilir, sehingga menyebabkan kurangnya berbagai tumbuhan dan hewan liar yang sangat berguna bagi mereka.

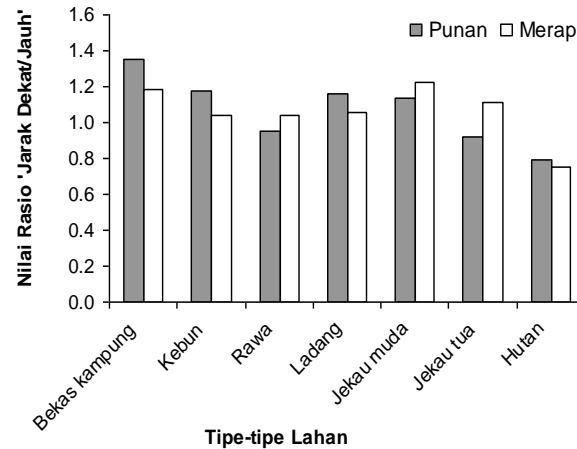


Gambar 2. Hasil kegiatan distribusi kerikil untuk sumber-sumber hasil (produk) yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk semua desa sampel

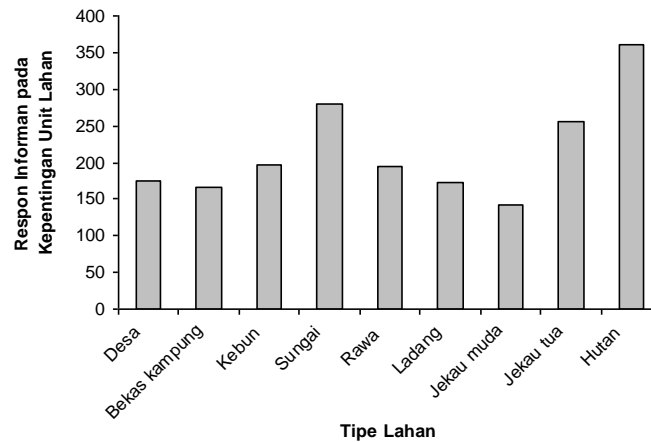
Pengaruh Jarak Unit Lahan dan Kategori Kepentingan pada Pentingnya Hutan

Atribut 'jarak' dan 'kategori kepentingan' dipertimbangkan berpengaruh pada penilaian masyarakat lokal tentang pentingnya hutan di lansekap mereka. Pengaruh jarak pada pentingnya tipe-tipe lahan (Gambar 3), ditunjukkan oleh besarnya nilai rasio jarak. Nilai hutan nampak menjadi sedikit berkurang dengan meningkatnya nilai rasio. Bertambahnya jarak yang harus tempuh, umumnya berpengaruh pada terjadinya perbedaan kepentingan pada lahan tertentu. Jauhnya jarak menuju lokasi hutan (umumnya terjadi di

desa-desa di hilir), menyebabkan nilai hutan menjadi sedikit berkurang, terutama dalam menyediakan sumber-sumber produk yang diminati oleh masyarakat lokal. Namun beberapa informan menjelaskan bahwa pada jarak jauh, mereka masih mempunyai akses untuk mengambil hasil hutan seperti gaharu, rotan atau hewan liar.



Gambar 3. Rata-rata nilai rasio jarak suku Punan dan Merap di setiap tipe lahan di seluruh desa survei.



Gambar 4. Nilai respon informan (suku Punan dan Merap) untuk Kepentingan Unit Lahan di seluruh desa survei.

Setiap tipe lahan memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda. Hasil kegiatan skoring, Gambar 4, menunjukkan respon seluruh grup informan dalam menilai lahan dan hutan berdasarkan kategori kepentingan. Hampir semua responden memberikan respon bahwa hutan merupakan tipe lahan yang dapat memberikan jasa untuk semua kategori kepentingan. Respon paling tinggi diberikan pada lahan hutan. Jekau muda merupakan tipe lahan yang paling sedikit mendapatkan respon dilihat dari kategori kepentingan yang ada pada lahan tersebut. Berdasarkan pada kategori kepentingan, maka yang terpenting dari hutan bagi Merap dan Punan adalah untuk kategori ‘makanan’, ‘anyaman’ dan ‘bahan berburu’, karena pada kategori kepentingan tersebut, sangat umum dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Beberapa barang anyaman yang sangat berguna bagi masyarakat lokal dan dapat memberikan tambahan penghasilan adalah keranjang, tikar, bahan pengikat, dan topi.

Pentingnya Tipe Lahan Lain bagi Suku Merap dan Punan

Dengan berkurangnya sumber pencaharian dari hutan, maka ‘ladang’ menjadi pilihan masyarakat Merap dan Punan setelah ‘hutan’ (Tabel 1), yang umumnya digunakan untuk menanam tanaman pertanian. Ladang, juga kebun dan jekau muda, sering di pakai untuk menangkap binatang buruan, terutama babi (*Sus barbatus*) dan rusa (*payau, Cervus unicolor; pelanuk kancil, Tragulus napu*). Fenomena perubahan penggunaan hutan menjadi ladang merupakan hal umum bagi desa-desa di hilir sungai Malinau.

‘Sungai’ bagi kedua suku dipandang sebagai lahan yang memiliki nilai penting tinggi setelah hutan. Umumnya digunakan sebagai sumber ‘makanan’, misalnya: berbagai jenis ikan, namun jenis ikan yang paling disukai adalah Tor tambra, atau dijadikan ‘tempat berburu’ hewan-hewan liar seperti ikan, labi-labi, kura-kura, belut, biawak dan lain-lain. Sungai juga digunakan untuk mendapatkan ‘kayu bakar’, ini terkait dengan banyaknya kayu-kayu yang hanyut dari hulu dan banyak terdampar di tepi-tepi sungai yang lokasinya dekat dengan rumah mereka.

‘Kebun’ sedikit kurang penting dari ladang dan hanya digunakan untuk menanam sayuran (jagung, ubi, singkong, ketimun, kacang panjang, cabe, bawang dll.). Namun di desa Merap di Langap dan Gong Solok, kebun dipakai untuk mengembangkan tanaman tahunan (kopi, vanila, coklat), sehingga memberikan pendapatan lebih baik.

Istilah jekau, digunakan untuk lahan-lahan yang dipakai untuk ladang. ‘Jekau muda’ banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan kayu bakar, menanam sayur-mayur dan mengambil tanaman liar yang tumbuh di lahan ini untuk dimakan (jamur, paku-pakuan, dan tunas bambu atau ‘umbut’), sedangkan ‘jekau tua’ digunakan kembali menjadi ladang, terutama setelah lahan ini berumur 15 tahun, dimana kesuburan tanah telah kembali (Basuki dan Sheil 2004; Uluk *et al.*, 2001).

Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Merap dan Punan

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan kepala adat, masyarakat dayak Merap dan Punan sejak jaman dahulu selalu menghubungkan hutan dengan kepercayaan spiritual. Hutan selain menyediakan sumberdaya dan lahan untuk berladang, juga merupakan tempat kuburan keramat, atau tempat untuk bersembunyi dari bahaya. Masyarakat lokal telah

berupaya melakukan perlindungan hutan, yaitu melalui peraturan adat yang melarang untuk berladang atau mengambil sumberdaya pokok di tempat tertentu agar hutan dapat digunakan terus menerus. Contohnya, pada tempat-tempat khusus diberlakukan peraturan adat, yaitu: 1. Hutan Adat (terdapat di setiap wilayah desa dan memiliki fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tempat rekreasi), 2. Hutan Lindung (lokasi di sungai Seturan dan Rian dilindungi karena menghasilkan sarang burung yang sangat bernilai terutama bagi masyarakat desa Langap), 3. Kuburan (dipercaya sebagai tempat keramat sehingga tidak boleh diganggu atau dijadikan tempat berladang atau berkebun), 4. Air Asin (tempat ini menjadi keramat karena masyarakat percaya bahwa mendatangi tempat ini bisa mendatangkan bencana bagi mereka). Masyarakat dayak Merap dan Punan juga memberlakukan tabu untuk menjalankan pengelolaan hutan, misal: beberapa binatang dan tumbuhan tidak boleh diganggu karena memiliki fungsi khusus, misalnya: pohon menggris (*Koompasia sp.*) yang memiliki sarang madu, burung rangkong (*Buceros sp.*) dan monyet (*Macaca sp.*), yang membantu menyebarkan benih, pohon beringin (*Ficus sp.*) yang buahnya sangat digemari oleh burung, atau pohon ulin (*Eusideroxylon sp.*) yang buahnya sangat digemari oleh landak (*Hystrix sp.*). Binatang tersebut dipercaya mempunyai peran penting dalam memelihara fungsi hutan, seperti burung dan hewan pemakan buah, karena membantu penyebaran benih atau buah yang mereka makan. Tabu sudah ada di masyarakat tradisional sejak dahulu dan dijalankan hingga kini melalui aturan adat. Hasil penelitian ini didukung oleh Sardjono and Samsuedin (2001), yang menyatakan bahwa aturan adat dapat dipakai dalam pengelolaan hutan secara lestari, berlaku secara turun temurun dalam bentuk kepercayaan, adat dan tradisi. Sayangnya, hukum adat umumnya tidak tertulis, sehingga sering menciptakan konflik dalam pelaksanaannya.

Perubahan Sosial dalam Masyarakat Dayak Merap dan Punan

Sumber pencaharian utama masyarakat Dayak Merap dan Punan dari hasil survei adalah 82% langsung dari hutan (431 jiwa), 12% dari hutan secara tidak langsung (37 jiwa), dan 6% dari sektor non hutan (72 jiwa). Sumber pencaharian dari hutan mayoritas adalah sebagai peladang (Dayak Merap), kemudian sebagai pencari gaharu (Dayak Punan). Namun saat ini masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi sumber pencaharian mereka, karena wilayah hutan milik mereka tumpang tindih dengan wilayah hutan milik *stakeholder* komersil yang mengakibatkan terjadinya konflik kepemilikan lahan. Selain itu, terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak awal tahun 1998 telah membuat kondisi ekonomi masyarakat lokal di wilayah Malinau menjadi semakin sulit. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang tak terelakkan bagi kedua suku tersebut. Adanya proses pembangunan dan intervensi dari pihak luar di wilayah hutan Malinau turut memicu terjadinya perubahan tersebut. Perubahan sosial yang terjadi di wilayah Malinau, misalnya menyangkut perubahan persepsi dan gaya hidup.

Persepsi mereka tentang hutan telah berubah. 'Hutan' tidak lagi merupakan sumber kehidupan, namun lebih dari pemenuhan kebutuhan akan lahan. Adanya tekanan dan minat dari orang luar terhadap sumberdaya hutan dan lahan di wilayah Malinau mengakibatkan masyarakat lokal melakukan konversi hutan menjadi ladang. Ini adalah contoh ketidakberdayaan masyarakat lokal pada legalitas yang berlaku, sehingga untuk